
NELAYAN DAN BOS LOKAL
(ANALISIS MATA RANTAI KETIMPANGAN KEKUASAAN PADA
MASYARAKAT NELAYAN DI SUNGAILIAT)

Olla Vellanda, Ibrahim dan Sujadmi

Universita Bangka Belitung

E-mail: ollavellaedyson@gmail.com, iim_babel@yahoo.com dan
sujad.m13@gmail.com

Diterima: 17

Maret 2021

Direvisi: 12 April
2021

Disetujui: 15
April 2021

Abstrak

Ketimpangan kekuasaan merupakan permasalahan sosial yang telah mengakar ke berbagai lini kehidupan masyarakat di Indonesia, terutama terkait pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang seharusnya dikelola secara adil, telah diubah menjadi ladang kekayaan pribadi para kaum elit. Pengelolaan sumber daya perikanan di Kabupaten Bangka adalah salah satu skala kecil dari persoalan ketimpangan kekuasaan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mata rantai ketimpangan kekuasaan pada masyarakat nelayan di Sungailiat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang melatar belakanginya. Penelitian ini menggunakan konsep orang kuat lokal (*local strongmen*) oleh Joel S. Migdal sebagai landasan dasar penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang sumber data primernya berasal dari wawancara tidak terstruktur dengan 11 informan. Para informan tersebut terdiri dari 3 orang nelayan juragan, 4 orang nelayan buruh, 2 orang bos lokal, 1 orang tengkulak dan 1 orang pedagang ikan eceran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan ketimpangan kekuasaan yang terjadi pada masyarakat nelayan di Sungailiat merupakan dampak yang ditimbulkan dari fenomena "orang kuat lokal". Ketidakberdayaan nelayan yang kemudian membangun pola hubungan *patron-klien* dengan bos lokal menjadi mata rantai pertama ketimpangan kekuasaan. Adapun faktor yang melatarbelakangi persoalan ketimpangan tersebut ialah (1) keterbatasan modal dan akses terhadap pasar, (2) skenario bos lokal, serta (3) lemahnya posisi negara.

Kata Kunci: *Nelayan, Ketimpangan Kekuasaan, Orang Kuat Lokal, Patron-Klien.*

Abstract

Power inequality is a social issue that has taken root in various aspects of the life of Indonesians, especially in the aspect of natural resource management. Natural resources that should be managed fairly have been shifted into personal wealth resources for the elite. The fishery resource management in Bangka Regency is one of the small scale problems of this power inequality. Accordingly, this study aims to analyze the chain of power inequality in the fishing community in Sungailiat and to identify its background factors. This study applies the theory of local strongmen proposed by Joel S. Migdal as the main theoretical basis of this research. According to Migdal, there are three main arguments related to that theory, namely web-like societies, social

control, and weak state. At the same time, a qualitative descriptive method was used as the method of this study, and the primary data were obtained from unstructured interviews with 11 informants, including 3 fisherman employers, 4 fisherman laborers, 2 local bosses, 1 middleman, and 1 retail fish seller. Lastly, the results of this study show that the power inequality issue that occurred to the fishing community in Sungailiat is an impact of the local strongmen phenomenon. Additionally, the pattern of patron-client relationship between the fishermen and the local bosses is the first chain of this power inequality. Furthermore, the background factors of this power inequality are (1) the lack of capital and access to markets, (2) the local boss scenario, and (3) the weak state position.

Keywords: Fishermen, Power Inequality, Local Strongmen, Patron-Client.

Pendahuluan.

Ketimpangan ekonomi menyebabkan ketimpangan kekuasaan dalam hal siapa yang membuat aturan, siapa yang menguasai modal dan sumber daya dan siapa yang dapat menentang status *quo* (Heikal, 2017), juga selama ini kajian tentang persoalan ketimpangan hanya menyangkut masalah pendapatan dan kekayaan. Akan tetapi, ketimpangan pada strukturnya adalah mengenai bahwa mereka yang berada di atas memiliki akses istimewa, dan pengaruh pada proses pengambilan keputusan yang dimanfaatkan agar perekonomian dan berbagai kebijakan dapat melayani kepentingan mereka semata (Heikal, 2017).

Ketimpangan kekuasaan merupakan permasalahan sosial yang telah mengakar ke berbagai lini kehidupan masyarakat di Indonesia, terutama terkait pengelolaan sumber daya alam. Menurut Resosoedarmo dalam (Zahri, 2005), sebagai makhluk hidup, manusia berinteraksi dengan alam lingkungannya. Interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya, tidak hanya ditentukan oleh jenis dan jumlah benda hidup dan mati dari lingkungan alam, melainkan juga oleh kondisi dan sifat biotik dan abiotik tersebut. Termasuk sumber daya alam yang seharusnya dikelola secara adil, telah diubah menjadi ladang kekayaan pribadi para kaum elit. Hal tersebut pada dasarnya terjadi karena adanya sifat keserakahan dari orang-orang yang saling berlomba untuk menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya yang kemudian menciptakan jurang ketimpangan antara si kaya dan si miskin, dan nelayan bisa dikategorikan miskin karena rendahnya penghasilan mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sampai batas yang layak. Terakhir, rendahnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya kepemilikan peralatan kerja, modal dana, perumahan, permukiman dan lain-lain (Pinem, Widiono, & Irnad, 2019).

Pengelolaan sumber daya perikanan di Kabupaten Bangka, khususnya di Kecamatan Sungailiat adalah salah satu skala kecil dari persoalan ketimpangan kekuasaan yang jarang disadari oleh masyarakat banyak. Bidang perikanan yang merupakan potensi ekonomi kelautan yang baik dan strategis bagi pengelolaan potensi laut di sana dapat dikatakan gagal dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat nelayan yang menggantungkan hidupnya pada potensi sumber daya tersebut. Ada juga faktor eksternal datang dari luar kemampuan orang yang bersangkutan, seperti birokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang dapat menghambat seseorang dalam memanfaatkan sumberdaya. (Hasbi, 2019), padahal dengan wilayah lautnya mencapai 5,8 juta km² yang merupakan

wilayah laut terbesar di dunia, dengan garis pantai 95.181 kilometer, seharusnya menjadi sumberdaya alam yang potensial bagi kemakmuran rakyatnya terutama yang tinggal di pesisir (Juliantono & Munandar, 2016).

Nelayan pada umumnya mengalami kesulitan pada permodalan dan salah satu strategi yang dilakukan nelayan untuk memenuhi kebutuhan modal adalah dengan cara berhutang. Kelembagaan hutang dapat menjamin konsumsi, produksi dan pemasaran untuk bisa berjalan dengan seimbang. Rumah tangga menggunakan jasa hutang untuk konsumsi dan produksi, jasa hutang juga sebagai penampung hasil produksi (Muhartono & Nurlaili, 2018).

Kenyataan menunjukkan kehidupan nelayan dapat dikatakan bukan saja belum berkecukupan, melainkan juga masih terbelakang, termasuk dalam hal pendidikan, kesehatan, dan juga kesejahteraannya (Aqmal, Yoserizal, & Tantoro, 2020). Pekerjaan nelayan sejatinya penuh dengan resiko karena kendala yang dihadapi tidak hanya menyangkut lingkungan alam saja tetapi juga lingkungan sosial (Listyawati, 2016), maka dari itu menjadi nelayan tidaklah mudah.

Adapun fokus kajian dari penelitian ini adalah mengenai bagaimana mata rantai ketimpangan kekuasaan pada masyarakat nelayan di Sungailiat dan apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi masalah ketimpangan kekuasaan tersebut. Sebagai bahan pertimbangan, peneliti melakukan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu. Pertama, sebuah tesis yang ditulis oleh (Sulkarnain, 2018), dengan judul Kedua, sebuah jurnal penelitian yang dilakukan oleh Gadri Ramadhan Attamimi, Dkk t“Patron-klien dan Ketimpangan Sosial (Studi Kasus pada Masyarakat Nelayan di Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar)”. ahun 2018, yang berjudul “Kelas dan Ketimpangan Struktural Masyarakat Nelayan di Kota Ambon”. Ketiga, yaitu sebuah jurnal penelitian yang ditulis oleh (Sinaga, Widiono, & Irnad, 2015), Jurnal tersebut berjudul “Pola Hubungan Patron-Klien pada Komunitas Nelayan di Kelurahan Malabro Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu”. Meskipun sama-sama melakukan kajian yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat nelayan, yang membuat penelitian ini berbeda dengan ketiga penelitian tersebut adalah terkait fokus utama yang membahas tentang ketimpangan kekuasaan pada masyarakat nelayan di Sungailiat.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang faktor yang mempengaruhi mata rantai ketimpangan kekuasaan yang ada pada masyarakat di Sungailiat.

Kepentingan dari penelitian ini dilatarbelakangi adanya ketimpangan kekuasaan pada masyarakat nelayan di Sungailiat yang terus berlanjut, sehingga menarik peneliti untuk mencari tahu faktor apa saja yang ada dan memunculkan ketimpangan itu terjadi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Sungailiat mengingat mayoritas kelompok masyarakat nelayan di Kabupaten Bangka terpusat di wilayah tersebut.

Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun sampel yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yang terbagi menjadi beberapa kriteria, yaitu nelayan (terdiri dari nelayan juragan, nelayan buruh, dan kapten kapal), bos lokal (bos-bos ikan), tengkulak, serta pedagang ikan eceran (pedagang ikan di pasar).

Data yang digunakan dalam penelitian ini pada perinsipnya berdasar pada data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini merujuk pada hasil wawancara dan

pengamatan langsung peneliti terkait persoalan masyarakat nelayan di Sungailiat. Sedangkan, data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, akses internet (artikel, media *online*), serta dokumen-dokumen publikasi dari lembaga-lembaga tertentu yang relevan.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif model Miles dan huberman dalam (Martono, 2015) yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*verification*). Pada reduksi data, peneliti memilih dan memilah data melalui proses wawancara dan observasi yang dilakukan pada kalangan masyarakat nelayan di Sungailiat, seluruh data kemudian dikelompokkan dan dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya, pada penyajian data peneliti menampilkan data secara sistematis yang sudah diolah melalui proses reduksi data sebelumnya. Kemudian terakhir, pada penarikan kesimpulan peneliti melakukan pengambilan keputusan terhadap bagaimana mata rantai ketimpangan kekuasaan pada masyarakat nelayan di Sungailiat dan faktor-faktor yang melatarbelakangi permasalahan ketimpangan kekuasaan tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Menurut (Ningsih, 2011), nelayan bukan merupakan suatu entitas tunggal, mereka terdiri dari beberapa kelompok yang saling berinteraksi atau mempunyai hubungan sosial yang terpola dan dapat disebut sebagai pengorganisasian sosial. Hubungan sosial yang dimaksud oleh Ningsih tersebut sama halnya dengan jaringan sosial. Sebagai masyarakat berjejaring, nelayan sering kali memanfaatkan jaringan sosial tersebut sebagai sarana efektif dalam mengatasi tekanan sosial-ekonomi yang datang setiap saat.

Untuk menghadapi segala kemungkinan permasalahan yang sedang terjadi, nelayan membutuhkan sokongan seorang *patron* yang memiliki kekayaan dan kemampuan dalam memasarkan hasil tangkapan dalam waktu yang singkat. Lantas, sosok *patron* yang mereka anggap sesuai dengan kualifikasi tersebut adalah bos lokal. Dengan segala kemampuan yang dimiliki bos lokal sebagai jaringannya, nelayan kemudian membangun hubungan kerja sama berbentuk *patron-klien*.

Melalui pola hubungan *patron-klien* ini, bos lokal memiliki tanggung jawab untuk memberi bantuan kepada nelayan yang biasanya berupa pinjaman, baik uang ataupun dalam bentuk barang. Sebagai timbal balik, nelayan pun berkewajiban untuk menjual semua hasil tangkapannya kepada bos lokal. Dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa nelayan menjadikan bos lokal sebagai penyokong hidup mereka, akan tetapi melalui pola hubungan tersebut secara otomatis membentuk keadaan dimana bos lokal memiliki kuasa untuk memperkuat pengaruhnya terhadap nelayan. Kekuatan yang dimiliki oleh bos lokal inilah yang kemudian berdampak pada semakin dalamnya jurang ketimpangan kekuasaan pada masyarakat nelayan. Bahkan bisa dikatakan, hubungan *patronase* ini adalah mata rantai pertama yang menyebabkan munculnya rantai-rantai ketimpangan kekuasaan lainnya.

A. Mata Rantai Ketimpangan Kekuatan pada Masyarakat Nelayan di Sungailiat

Menurut (Kusnadi, 2002), melalui hubungan kerja sama yang dilakukan oleh nelayan dan pedagang perantara (dalam hal ini adalah bos lokal), nelayan akan selalu menjadi pihak yang kurang diuntungkan. Pernyataan tersebut selaras dengan apa yang terjadi pada masyarakat nelayan di Sungailiat saat ini. Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan, rantai ketimpangan kekuasaan yang terjadi pada masyarakat nelayan di sana sudah terjalin cukup jauh.

Mata rantai dari ketimpangan kekuasaan tersebut pertama-tama dapat dilihat dari timpangnya sistem penentuan harga beli ikan oleh bos lokal. Kenyataan menunjukkan, nelayan tidak memiliki hak dalam mengintervensi nilai beli dari hasil tangkapannya. Walaupun nelayan menyadari bahwa ikan-ikan yang berhasil mereka tangkap dibeli dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan ikan-ikan nelayan lain yang jenis tangkapannya sama, nelayan tersebut tidak memiliki kuasa untuk melakukan komplain.

Menurut bos lokal, nelayan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan harga ikan. Satu-satunya pihak yang berwenang adalah bos itu sendiri karena merasa hanya mereka yang paling mengetahui kondisi pasar. Dengan melakukan analisis lebih jauh terkait persoalan tersebut, pada akhirnya tingkat perolehan pendapatan nelayan tidak akan jauh berbeda antara musim ikan dan tidak musim ikan. Pada saat musim ikan dan nelayan menghasilkan banyak tangkapan, tingkat harga beli ikan sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar, dimana ketika ikan "banjir" dipasaran otomatis harga beli ikan akan menurun.

Bos lokal yang mengambil komisi berupa "bagian" yang besarnya sesuai dengan kesepakatan awal, jelas tidak akan mengalami penurunan penghasilan tersebut. Begitu pula ketika sedang tidak musim ikan, meskipun harga ikan akan melonjak mahal, hal itu tidak akan memberi keuntungan yang berlipat bagi nelayan, kecuali bagi bos lokal.

Beranjak dari permasalahan harga beli ikan, ketimpangan kekuasaan yang terjadi pada masyarakat nelayan di Sungailiat juga dapat dilihat dalam sistem bagi hasil. Dalam hubungan kerja sama antara nelayan dan bos lokal, terdapat sistem bagi hasil berupa "bagian" yang menjadi penentu besarnya jumlah penghasilan yang diperoleh masing-masing pihak.

Sistem penentuan jumlah "bagian" ini tergantung dari kesepakatan antara nelayan dan bos lokal. Akan tetapi, terlepas dari hal tersebut bos lokal tetap akan menjadi pihak yang paling diuntungkan. Besarnya suntikan modal yang bos lokal berikan kepada nelayan mempengaruhi besarnya kekuasaan yang mereka miliki. Selain memperoleh keuntungan melalui penjualan ikan, bos lokal juga mendapatkan "satu bagian" dari hasil penjualan ikan nelayan. Hal ini mirip dengan sistem penanaman modal yang biasanya dilakukan oleh investor terhadap suatu perusahaan.

Bos lokal yang menginvestasikan uang, kapal, ataupun alat tangkap untuk dijadikan sebagai modal usaha nelayan, dianggap berhak mendapatkan "bagian" dari keuntungan yang diperoleh. Selain mendapatkan "bagian", modal awal yang bos lokal berikan juga wajib dibayarkan oleh nelayan dalam bentuk cicilan disetiap penjualan yang dilakukan. Besaran dari cicilan tersebut tergantung dari seberapa besar penghasilan yang nelayan terima dalam satu kali melaut.

Kondisi tersebut, jelas merugikan nelayan dan sangat memperlihatkan adanya ketimpangan di sana. Meski nelayan mendapatkan bagian yang lebih besar, tetapi mereka masih harus membagi hasil penjualan tersebut untuk upah para anak buah kapal (buruh nelayan), biaya operasional (bahan bakar dan ransum), biaya perawatan kapal dan alat tangkap. Terlebih lagi jika nelayan mengalami masalah kesehatan, tidak semua dari mereka memiliki jaminan sosial sehingga harus menanggung biaya kesehatan dengan uang pribadi.

Berbeda dengan nelayan, bos lokal tidak memiliki tanggung jawab tertentu selain memberikan bantuan berupa pinjaman ketika nelayan mengalami desakan kebutuhan. Walaupun demikian, bantuan tersebut tetaplah sebuah hutang yang pada akhirnya harus nelayan bayar. Dalam hal ini dapat dilihat jika apa yang dikorbankan oleh bos lokal, sangat tidak sebanding dengan nelayan.

Perihal sangkutan hutang atau pinjaman, dalam sistem pemotongannya juga

menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan. Sangkutan hutang tersebut dipotong tergantung kondisi pendapatan nelayan dan bagaimana sifat personal bos lokal. Ketika nelayan memiliki bos yang dapat memahami kondisi mereka, maka hutang tersebut hanya akan dipotong ketika nelayan mendapatkan hasil penjualan yang besar.

Akan tetapi, disisi lain terdapat beberapa bos lokal yang tetap memotong hasil tangkapan nelayan meskipun hasil penjualannya tidak begitu baik. Hal ini biasanya akan terjadi ketika bos lokal sudah merasa tidak diuntungkan atau ketika mereka tidak lagi berkeinginan untuk mempertahankan hubungan kerja sama.

B. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Masalah Ketimpangan Kekuatan pada Masyarakat Nelayan di Sungailiat.

1. Keterbatasan modal dan akses terhadap pasar.

Sebagai masyarakat yang sering kali digolongkan sebagai masyarakat miskin, persoalan modal selalu menjadi permasalahan utama bagi nelayan. Modal tidak hanya diperlukan pada awal memulai usaha, akan tetapi pada setiap kali jadwal mereka melaut. Kondisi penghasilan disetiap musimnya yang tidak melulu bagus, menjadikan nelayan tidak dapat menyokong kebutuhan usahanya sendiri.

Melalui keterbatasan modal tersebut, nelayan menjadi sulit untuk melepaskan diri dari jeratan lingkaran setan kekuasaan yang diciptakan oleh bos lokal yang selama ini menjadi penyebab mereka terus terjebak dalam persoalan ketimpangan. Bos lokal memanfaatkan ketidakberdayaan tersebut dengan berkedok menjadi *patron* dan memperoleh legitimasi masyarakat setempat. Legitimasi inilah yang kemudian menjadikan mereka berkuasa dan mampu mengontrol nelayan beserta jaringannya.

Selain modal, persoalan lain yang nelayan hadapi adalah terbatasnya akses mereka terhadap pasar. (Kusnadi, 2002) menjelaskan, dikarenakan jaringan perdagangan ikan sudah dikuasai secara total oleh pedagang perantara, tentu ia memiliki kemampuan dan keterampilan yang tinggi untuk mengatasi keterbatasan daya tahan kualitas hasil tangkapan agar segera laku terjual. Pedagang perantara dalam hal ini adalah bos lokal juga memiliki kemampuan dan keterampilan yang sama.

Berbeda dengan nelayan, bos lokal yang memiliki jaringan kekuasaan menjadikannya mampu untuk menguasai akses dalam proses pemasaran sumber daya perikanan di daerah. Salah satu dari akses tersebut adalah sebagai penyuplai ikan ke berbagai industri pengolahan ikan khusus ekspor. Meskipun terdapat tengkulak dan pedagang pasar dalam perputaran bisnis perikanan, bos lokal adalah satu-satunya orang yang memiliki kekuasaan dan pengaruh paling besar.

Kondisi hasil tangkapan yang tidak bisa disimpan terlalu lama, membuat nelayan diharuskan untuk menjual habis hasil tangkapannya dalam jangka waktu yang singkat. Akan tetapi, jika nelayan tetap berusaha melakukan pemasaran mandiri, mereka tidak akan mampu memanfaatkan daya serap pasar daerah yang hanya bisa diakses oleh bos lokal. Untuk mengatasi hal itu, mereka pun mau tidak mau harus tetap bergantung pada keterampilan dan jaringan bisnis bos lokal dalam memasarkan hasil tangkapannya.

Kekuasaan yang dimiliki bos lokal dapat dianalogikan sebagai “keran”. Mereka memiliki kuasa atas mengatur aliran distribusi sumber daya ikan di Sungailiat sesuai dengan kehendaknya. Akan sulit bagi siapa saja, baik itu nelayan, pedagang pasar, ataupun tengkulak untuk bertahan tanpa menjalin hubungan kerja sama dengan bos lokal. Hal itu pula yang juga membuat nelayan terpaksa menggantungkan hidupnya kepada bos lokal terlepas dari permasalahan ekonomi yang mereka alami.

2. Skenario

bos

local

(Satria, 2015) menyatakan bahwa kuatnya ikatan *patron-klien* merupakan konsekuensi dari sifat kegiatan penangkapan ikan yang penuh dengan resiko dan ketidakpastian. Merujuk pada pernyataan tersebut, dapat dijelaskan hubungan *patron-klien* yang sebagaimana merupakan awal dari timbulnya permasalahan ketimpangan kekuasaan pada masyarakat nelayan di Sungailiat, menjadi kuat karena konsekuensi dari ketidakberdayaan nelayan dalam menghadapi besarnya resiko dan ketidakpastian yang mereka alami.

Menurut Arif (2018) “orang kuat lokal” memainkan segala cara demi meraih tampuk kekuasaan, dan setelahnya menggunakan segala cara pula untuk mempertahankan kekuasaannya. Sebenarnya, ketidakberdayaan nelayan yang selama ini menjadi alasan utama mengapa permasalahan ketimpangan kekuasaan ini terus berlanjut adalah kondisi yang memang sengaja diciptakan dan dipelihara oleh bos lokal. Lebih jelasnya, mereka sengaja menciptakan ketidakberdayaan nelayan tersebut untuk menempatkan nelayan tetap berada di bawah kekuasaannya.

Berdasarkan pengakuan seorang nelayan, jika mereka melakukan usaha mandiri dengan menjual sendiri hasil tangkapannya di pasar, maka secara otomatis nelayan tersebut memutuskan hubungan kerja samanya dengan bos lokal dan keduanya akan menjadi pesaing. Sedangkan, bersaing dengan bos lokal adalah hal yang sia-sia bagi mereka karena para bos lokal dianggap sudah memiliki “permainannya” masing-masing.

Nelayan lainnya juga mengatakan bahwa lapak-lapak ikan di pasar tidak bisa didapatkan dengan mudah. Lapak-lapak tersebut hanya dimiliki oleh para bos lokal atau orang-orang yang bekerja sama dengan mereka. Maka dari itu, akan menjadi sia-sia bagi nelayan jika mereka berusaha untuk menjual sendiri hasil tangkapannya di pasar hanya demi mendapatkan untung yang lebih besar. Akses terhadap pasar sudah tertutup, ikan yang akan dijual belum tentu dapat habis dibeli konsumen. Kondisi inilah yang membuat nelayan pada akhirnya pasrah dan diam saja jika bos lokal membeli hasil tangkapannya dengan murah. Dengan kata lain, untung sedikit akan lebih baik daripada tidak mendapatkan apa-apa.

Hampir seluruh nelayan memiliki sangkutan hutang dengan masing-masing bos lokal. Oleh karena itu, hutang adalah alasan lainnya yang membuat nelayan sangat tidak mungkin untuk keluar dari jaringan bos lokal. Meskipun nelayan tersebut berhasil melunasi hutangnya, kebanyakan uang tersebut adalah uang pinjaman dari bos lokal lainnya. Jadi, hal apa pun yang diusahakan nelayan untuk keluar dari kesulitan-kesulitan yang dialami, pada akhirnya mereka tetap akan terikat dan tunduk terhadap sistem yang dibangun oleh bos lokal.

3. Lemahnya posisi negara.

Permasalahan ketimpangan kekuasaan yang dihadapi masyarakat nelayan sebenarnya dapat ditekan jika negara mampu memberi kebijakan yang tegas dalam menengahi hubungan kerja sama antara nelayan dan bos lokal yang menjadi mata rantai utama dari permasalahan ini. Sayangnya, kenyataan menunjukkan posisi negara berhasil dilemahkan oleh keberadaan bos lokal.

Faktor yang menyebabkan lemahnya negara dihadapan bos lokal berkaitan dengan pengaruh kontrol yang dimiliki bos lokal. Pengaruh kontrol ini dapat sangat terasa ketika menjelang pesta demokrasi, yaitu Pilkada (pemilihan kepala daerah) dan Pileg (pemilihan legislatif). Tidak jarang para aktor politik yang akan mencalonan diri biasanya melakukan kesepakatan kepada bos lokal untuk mendukungnya. Besarnya kelompok masyarakat nelayan di Sungailiat, mampu mendongkrak perolehan suara mereka.

Argumentasi tersebut diperoleh dari kesaksian narasumber bernama Sule dan Tamsir yang mengatakan bahwa disetiap masa pemilihan, bos lokal memang sering kali

mengenalkan mereka dengan calon-calon tertentu. Biasanya bos lokal akan mengajak calon tersebut untuk menghadiri perkumpulan kelompok, hingga menjadi undangan pada acara pernikahan keluarga nelayan.

Ketika para aktor politik tersebut berhasil memenangkan pemilihan dan menjadi legislator, maka mereka akan digunakan bos lokal sebagai tameng pelindung. Tidak hanya mereka, bos lokal juga menjerat para oknum aparat dan birokrat pemburu rente (*rent seeking bureaucrats*) yang rakus untuk membantunya menyelesaikan dan menutupi pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan selama berbisnis.

Sejalan dengan fakta tersebut, dalam membangun negosiasi dan pengelolaan aset ekonomi, kelincahan bos lokal memang tercermin dari konsensus yang berhasil mereka bangun bersama para oknum pejabat negara. Melalui hubungan mutualisme tersebut, pejabat negara memperoleh dukungan modal dan kekuatan sosial, begitu pun sebaliknya "orang kuat lokal" memperoleh konsesi pengelolaan aset ekonomi (Solissa, 2016)

Berdasarkan pernyataan dari para nelayan, permainan antara bos lokal dan aparat memang sering terjadi. Sudah menjadi rahasia publik bahwa setiap bos lokal memiliki "deking" atau pelindung untuk meloloskan mereka dari jeratan hukum. Nelayan berinisial SK mengatakan, dalam melaut terkadang kapal-kapal milik bos lokal menggunakan peralatan yang terlarang, yaitu *trol* (alat tangkap ikan yang dapat merusak ekosistem laut). Untuk melancarkan aksinya, bos lokal memanfaatkan pengaruh kekuasaannya terhadap oknum-oknum aparat tersebut. Dengan begitu, kapal-kapal mereka pun berhasil lolos dan tetap beroperasi.

Melalui pelemahan-pelemahan yang dilakukan bos lokal terhadap anggota dewan, oknum birokrat dan aparat tersebut, tentunya membuat proses pengimplementasian kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat (khususnya nelayan) menjadi terhambat. Seperti halnya kebijakan pengadaan koperasi dan bantuan-bantuan yang diperuntukkan bagi nelayan. Setidaknya, jika kebijakan tersebut diimplementasikan dengan benar, dipastikan nelayan dapat mempunyai ruang gerak untuk berkembang dan keluar dari permasalahan ketimpangan.

C. Ketimpangan Kekuasaan pada Masyarakat Nelayan di Sungailiat sebagai Fenomena "Orang Kuat Lokal"

Berdasarkan hasil analisis dari temuan di lapangan, persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat nelayan di Sungailiat merupakan refleksi dari fenomena "orang kuat lokal". Melalui penjelasan pada bagian awal pembahasan, dapat dilihat bahwa semua temuan tersebut mengarah pada praktik penguasaan bisnis perikanan lokal oleh "orang kuat" sebagaimana yang dimaksud Migdal dalam konsep berpikirnya.

Argumentasi pertama, Migdal mengatakan "orang kuat lokal" tumbuh subur dalam masyarakat mirip jaringan. Berkenaan dengan hal tersebut, nelayan di Sungailiat juga cenderung memiliki pola jaringan yang sama. Pola jaringan sosial yang digunakan oleh para nelayan tersebut berbentuk *patron-klien* yang memang sering kali digunakan sebagai bingkai dalam diskusi mengenai fenomena orang kuat lokal.

Sebagai "orang kuat", eksistensi bos lokal dalam kehidupan masyarakat nelayan di Sungailiat juga memiliki pengaruh besar yang bahkan melampaui para pemimpin daerah dan birokrat. Baik birokrat ataupun pemimpin daerah, keduanya adalah bagian dari segitiga akomodasi bos lokal yang juga disinggung oleh Migdal sebagai strategi "orang kuat lokal" untuk bertahan.

Luasnya pengaruh jaringan bos lokal, hal tersebut menjadikan nelayan tidak memiliki

kesempatan untuk berkembang. Jaringan pasar yang juga berhasil dikuasai bos lokal membuat nelayan harus terus bergantung dengan mereka sebagai satu-satunya jalan untuk menyambung hidup. Dalam hal ini, terlepas dari segala permasalahan yang dialami nelayan, mereka telah kehilangan posisi tawarnya (*bargaining position*). Keberadaan bos lokal sebagai “orang kuat” berhasil menjerat nelayan dengan kemampuan modal dan kekayaan yang dimiliki. Bantuan berupa hutang menjadi tali efektif untuk mengikat nelayan dan membuat mereka terus bergantung.

Selanjutnya, pada argumentasi kedua, yaitu pengaruh kontrol dan legitimasi, hal inilah yang sebenarnya menyebabkan nelayan sangat terpaku pada bos lokal dan mengesampingkan keberadaan negara (pemerintah). Bos lokal yang berperan sebagai *patron*, memberi berbagai kebaikan personal kepada masyarakat nelayan hingga berhasil memperoleh legitimasi darinya.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bos lokal sering memberi bantuan berupa pinjaman kepada para nelayan disaat mereka mengalami kesulitan. Melalui bantuan-bantuan tersebut, pada akhirnya nelayan pun menaruh empati kepada bos lokal dan mempercayai mereka sebagai *patron* dan tempat bergantung hidup. Situasi itulah yang menyebabkan bos lokal berhasil memperoleh legitimasi dan kemampuan kontrol atas nelayan.

Akan tetapi, para nelayan tidak menyadari bahwa kebaikan-kebaikan tersebut hanyalah “kedok” untuk menjerat mereka. Melalui kemampuan kontrol yang diperoleh, bos lokal berhasil menguasai nelayan beserta jaringannya (tengkulak dan pedagang ikan) untuk mendominasi pasar perikanan daerah. Dengan begitu, bos lokal berhasil menjadi pengendali “keran” pendistribusian sumber daya ikan di daerah dan menjadikan mereka sebagai kelompok teratas pada piramida perdagangan ikan di sana.

Terakhir, terkait argumentasi ketiga, dimana “orang kuat lokal” yang berhasil melemahkan negara dengan membatasi otonomi dan kapasitas lembaga serta para aparaturnya merupakan hal yang juga terjadi pada kehidupan masyarakat nelayan di Sungailiat. Bos lokal dengan segala pengaruh dan kekayaannya, berhasil mengendalikan para oknum aparaturnya, birokrat pemburu rente, hingga legislator untuk melancarkan kegiatan-kegiatan ekonominya. Hal tersebut dilakukan agar dapat terhindar dari berbagai kemungkinan hambatan yang akan mereka hadapi. Dengan keadaan tersebut, hal itu lantas menyebabkan negara kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada pembangunan masyarakat khususnya nelayan.

Berdasarkan pemaparan ketiga argumentasi tersebut, dapat dianalisis masalah ketimpangan kekuasaan yang terjadi pada masyarakat nelayan di Sungailiat merupakan dampak yang ditimbulkan dari fenomena “orang kuat lokal” di sana. Masalah ketimpangan adalah hal yang tidak bisa lepas dari diskusi “orang kuat lokal”. Bahkan, keberadaan mereka sendiri sudah menjelaskan adanya ketimpangan. Timpangnya perekonomian pada masyarakat nelayan adalah awal dari munculnya fenomena “orang kuat” ini, sehingga ketimpangan kekuasaan pun turut lahir di dalamnya.

Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Nelayan dan Bos Lokal (Studi terhadap Mata Rantai Ketimpangan Kekuasaan pada Masyarakat Nelayan di Sungailiat)”, yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan mata rantai ketimpangan kekuasaan yang terjadi pada masyarakat nelayan di Sungailiat dipengaruhi oleh pola hubungan masyarakatnya yang berjejaring.

Keterbatasan nelayan terhadap modal dan akses pasar membuat mereka memanfaatkan jaringan sosialnya sebagai jalan alternatif untuk tetap bertahan. Jaringan

sosial tersebut berupa hubungan *patron-klien* dengan bos lokal. Melalui hubungan *patron-klien* tersebut, bos lokal berhasil mendapatkan legitimasi dan kemampuan kontrol atas masyarakat nelayan hingga menyebabkan mereka terjebak pada persoalan ketimpangan.

Besarnya pengaruh kontrol yang dimiliki bos lokal, menyebabkan munculnya ketimpangan kekuasaan pada masyarakat nelayan. Hubungan yang sebenarnya berbentuk kemitraan/kerja sama, tetapi tidak seimbang dalam pembagian kuasa dan penentuan kesepakatan kerja atas hubungan tersebut. Ketimpangan kekuasaan ini juga berhasil menjadikan para bos lokal sebagai pengendali “keran” pendistribusian sumber daya ikan di daerah.

Berdasarkan mata rantai ketimpangan kekuasaan tersebut, dapat diidentifikasi bahwa terdapat tiga faktor yang menjadi penyebabnya. Pertama, yaitu persoalan keterbatasan modal dan akses terhadap pasar. Dalam hal ini, keterbatasan modal dan penguasaan akses dalam proses pemasaran sumber daya perikanan di daerah oleh bos lokal membuat nelayan mau tidak mau harus bergantung dengan mereka. Kedua, adalah berkenaan dengan skenario bos lokal yang sengaja menciptakan dan mempertahankan ketidakberdayaan nelayan. Dengan kata lain, bos lokal sengaja menjebak nelayan dalam lingkaran setan kekuasaan yang mereka buat. Ketiga, adalah terkait dengan lemahnya posisi negara. Dalam hal ini bos lokal berhasil menangkap sumber daya serta agen negara, sehingga berakibat pada terhambatnya pengimplementasian kebijakan yang seharusnya dapat membantu permasalahan masyarakat nelayan

Berdasarkan pemaparan tersebut, persoalan ketimpangan kekuasaan yang terjadi pada masyarakat nelayan di Sungailiat ini adalah dampak yang ditimbulkan dari fenomena “orang kuat lokal”. Ketimpangan merupakan persoalan yang tidak bisa lepas dari diskusi “orang kuat lokal” karena keberadaannya sudah menjelaskan adanya ketimpangan itu sendiri.

Bibliografi

- Aqmal, Romi, Yoserizal, & Tantor, Swis. (2020). *Mobilitas Mata Pencarian Nelayan Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga. Jisipol (Jurnal Stisipol) Raja Haji Tanjungpinang*, 2(1), 345–358.
- Hasbi. (2019). *Sekuritas Sosial Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Pada Komunitas Nelayan Pulau Kecil (Kasus Pulau Salemo, Desa Mattiro Bombang, Kecamatan Liukang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan). Jurnal Penelitian Kesastraan Sosial*, 18(1).
- Heikal, Husen Muhammad. (2017). *Mewaspada Ketimpangan*. Retrieved from <http://m.detik.com/news/kolom/d-3535191/mewaspada-ketimpangan>
- Juliantono, F., & Munandar, A. (2016). *Fenomena Kemiskinan Nelayan: Perspektif Teori Strukturasi. Jurnal Politik Universitas Nasional*, 12(2), 1857–1866.
- Kusnadi. (2002). *Konflik Sosial Nelayan (Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan)*. Yogyakarta: LkiS.
- Listyawati, Andayani. (2016). *Strategi Penanganan Kemiskinan Nelayan Tradisional. Perspektif*, 1(2), 61–70. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v1i2.88>
- Martono, Nanang. (2015). *Metode Penelitian Sosial : Konsep Konsep Kunci*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Muhartono, Rizky, & Nurlaili, Nurlaili. (2018). *Hutang Sebagai Pengikat Hubungan Nelayan Dan ‘ Pengambe ’ Di Kabupaten Jember , Provinsi Jawa Timur Debt As A Binding Relationship Between Fishers And „ Pengambe “ In The Jember Regency , East Java Province. Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 13(2), 239–248.

- Ningsih, Diah Ayu. (2011). *Pengaruh Ikatan Patron-Klien Terhadap Perilaku Helayan dalam Pemasaran Hasil Tangkapan (Kasus : Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten*. Institut Pertanian Bogor, Banten.
- Pinem, Eine Yamitha, Widiono, Septri Widiono, & Irnad, Irnad. (2019). *Kemiskinan Struktural Komunitas Nelayan Di Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu*. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(2), 91–112.
<https://doi.org/10.33369/jsn.5.2.91-112>
- Satria, Arif. (2015). *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta: Obor Buku.
- Sinaga, Herman, Widiono, Septri, & Irnad. (2015). *Pola Hubungan Patron- Klien Pada Komunitas Segara Kota Bengkulu The Pattern of Patron- Client Relationship in Fishermen Community in Malabro Municipal , Teluk Segara District , Bengkulu City*. *Agrisep*, 15(2), 167–176.
- Solissa, Marcelino. (2016). *Fenomena orang kuat lokal di indonesia: studi kasus tentang kemunculan keda dalam eksploitasi tambang emas di gunung botak Kabupaten buru provinsi maluku*. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanudi*, 2(2), 160–169. Retrieved from
<http://journal.unhas.ac.id/index.php/politics/article/download/3025/pdf>
- Sulkarnain. (2018). *Patron-Klien Dan Ketimpangan Sosial (Studi Kasus pada Masyarakat Nelayan di Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar) PATRON-KLIEN*.
- Zahri, Nasution. (2005). *Kemiskinan dan Adaptasi Masyarakat Nelayan pada Ekosistem Daerah Aliran Sungai Lempung, Sumatera Selatan: Suatu Pembedahan Fenomena Sosial Menggunakan Perspektif Ekologi*. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 7(2), 57–78.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).